Cempluk

Cempluk berpijar bersinar diruang-ruang yang gelap
Ibarat ruang itu INDONESIA
Cempluk adalah cahaya, harapan dan cita-cita

MEMPERBAIKI NASIB RAKYAT DENGAN KESADARAN MENGONTROL SOSIAL

HUBUNGAN PEMERINTAH DENGAN RAKYAT

Masih ingatkah kita pada kasus-kasus yang terjadi di Indonesia seperti perampasan tanah milik warga sipil, adu domba antar rakyat, budi daya kemiskinan, krisis ekonomi karena banyakhutang tapi nggak dibayar (yang disuruh bayar nantinya adalah rakyat melalui pajak-pajak) padahal mereka (rakyat kecil) tidak merasakan dana yang akan dilunasi nanti.. ada lagi penembakan mahasiswa di semanggi. Intimidasi, pencekalan dan penculikan aktivis pro demokrasi, KKN, tindakan brutal aparat terhadap aksi demonstrasi, pengekangan hak bersuara dan berpendapat dimuka umum, monopoli yang mematikan ekonomi kerakyatan dll. Sungguh mengenaskan dari kasus diatas kita dapat merenungkan, kenapa hal itu terjadi dan berlarut-larut? , kenapa negara Indonesia ini kian terpuruk dalam kebobrokan, ketidakadilan dan kejahatan, bukannya malah menjadi Indonesia yang baik bagi rakyatnya ? kita tentunya nggak mau terus menerus hidup dalam ketidak adilan, kesengsaraan dan kejahatan. Kita hidup dalam sebuah negara dimana ada Pemerintahan dan Rakyat.

PEMERINTAH identik dengan orang atau sekelompok orang yang bertugas mengatur dan mengambil kebijakan tentang Poleksosbud hankam ang dituangkan dalam (Peraturan2, UU, Keputusan2, dll), dalam rangka melindungi, memenuhi kebutuhan/hajat hidup orang banyak. Segala bentuk kebijakan pemerintah berpengaruh terhadap rakyat baik yang merugikan maupun yang menguntungkan dan respon atau reksi rakyat berpengaruh terhadap pemerintah untuk mengambil kebijakan selanjutnya yang tentunya lebih menguntungkan rakyat. Intinya respon atau reksi dari rakyat itulah yang akan memperbaiki nasib bangsa dan rakyat itu sendiri. Reaksi dan respon itu bisa berupa Kontrol Sosial, namun sayangnya banyak dari rakyat tidak sadar akan manfaat dari Kontrol Sosial.

DIKTATOR DAN KONTROL SOSIAL

Pemerintah sebagai pengambil kebijakan harusnya menerima aspirasi dari masyarakat, karena kebijakan itu diperuntukkan kepada rakyat. Namun apa yang terjadi selama Rezim ORBA sampai sekarang, apakah kita (Rakyat) diperbolehkan menentukan arah bangsa?. Kita memang ikut dalam pemilu tapi itu hanya sekedar pilihan suara dan dukungan, lalu bagaimana dengan ide-ide dalam benak rakyat tentang keadilan, kemakmuran, dan kebebasan ? Apakah Rakyat diberi hak menyalurkan ide, harapan dan cita-citanya ?. Kenyataanya rakyat tidak dilibatkan dalam menentukan masa depan bangsa Indonesia. Rakyat hanya dijadikan sebagai objek pasif dan sapi perahan guna menuruti kehendak penguasa serta kepentingan mereka (Birokrat, pemerintah dan elit politik) atau rakyat yang harus nerimo opo jare sing penguasa.

Rakyat dibodohi, direbut hak bersuaranya serta berpendapat dimuka umum, dengan begitu Hak Mengontrol Sosial ditiadakan ditangan rakyat. Siapa yang Vokal dan Kritis dikibas habis-habisan dengan dalih subversif, makar, Nggak sesuai

hukum (NON Konstitusional, Komunis, dll). Kemudian yang terjadi selama ini adalah Diktatorisme yang mana semua yang menyangkut kepentingan negara dibawah kendali penguasa, tanpa ada yang mengontrol mereka, Karena semua dibawah kendali penguasa maka apa yang dilindungi oleh penguasa tak bisa diotak-atik misalnya Praktek KKN, Monopoli, Industri minuman keras, pengurasan SDA hutan dan laut, pembodohan kepada rakyat, intimidasi, penculikan, kekerasan, penindasan, ketidak adilan dll. Pokoknya segala keputusan yang disahkan oleh presiden wajib dituruti walaupun hal itu merugikan rakyat, birokrasipun dibuat berbelit-belit dan tertutup untuk menutupi segala kecurangan yang terjadi dan terhadappengaduan usul, saran dan tuntutan dari rakyat pemerintah cenderung tuli.

Sungguh mengenaskan bagi rakyat yang telah ditipu, dibodohi dan ditindas, karena rakyat yang tidak sadar akan politik sehingga Kontrol Sosial tidak berfungsi dengan baik. Secara ringkas tidak berfungsinya Kontrol Sosial disebabkan Oleh :

1. DPR hanya dijadikan kedok penyalur aspirasi (keinginan) rakyat namun kenyataanya mereka hanya bisa menampungnya saja tanpa bisa mewujudkan atau menindak lanjuti.
2. Tekanan Rezim berupa Intimidasi, penggebukan, penculikan dengan di bentengi MILITER, apabila ada aksi yang berbau kontrol sosial.
3. Kesadaran berpolitik masyarakat yang masih kurang karena pembodohan-pembodohan yang kerapkali dilakukan Rezim.
4. Perjuangan rakyat yang terpisah-pisah sehingga kekuatan yang digunakan untuk melawan ketidakberesan dan ketidakadilan lemah.
5. Pragmatisme dikalangan masyarakat (perasaan buat apa diperjuangkan kalau hasilnya tidak tampak secara langsung)
6. Kurangnya Emphaty (rasa senasip) terhadap penderitaan orang lain (CUEK)
7. tata laksana hukum yang lebih berpihak pada uang, suap & pemerintahan.
8. proses pengaduan birokrasi yang berbelit-belit pemerintahan.

MENGEMBALIKAN MASYARAKAT YANG BERFUNGSI SEBAGAI KONTROL SOSIAL

Kontrol Sosial berfungsi untuk mengawasi tindak-tanduk pihak penguasa atau pengambil kebijakan jangan sampai mereka menyeleweng atau mengabaikan kepentingan rakyat dan negara. Pengawasan ini dilakukan oleh rakyat artinya apabila kontrol sosial ini dapat berfungsi dan berjalan maka kedaulatan yang menjadi ciri dari masyarakat Demokratis akan berada ditangan rakyatn serta apa yang menjadi harapan, cita-cita dan kesepakatan bersama bisa terwujud dengan baik. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara mengembalikan dan mewujudkan Kontrol Sosial ?

Usaha mewujudkan Kontrol Sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus dilandasi oleh rasa sadar sebagai bagian dari sistem sosial dimana ada Presiden, mentri, gubernur, militer, camat, lurah, dan rakyat biasa, artinya komponen-komponen atau orang-orang atau seluruh masyarakat Indonesia memainkan fungsi masing-masing dalam perpolitikan Indonesia, yaitu fungsi sebagai orang yang memerintah atau fungsi sebagai orang yang diperintah, dibodohi dan ditindas atau dengan kata lain yang diuntungkan dan dirugikan, lalu siapa yang dirugikan dalam negara RI selama ini ? jawabnya tentunya rakyat. Posisi rakyat adalah yang terbesar dalam sebuah negara (Indonesia), oleh karenanya kebijakan harus sesuai dengan keinginnan, harapan dan cita-cita rakyat sebagi moyoritas penghuni bangsa,. Perlu diingat tanpa adanya kontrol sosial oleh masyarakat jangan harap pemerintahan yang akan datang akan mendengar dan memperhatikan kita. Namun sebaliknya kita akan mengulang kembali sejarah 32 tahun dibawah rezim ORBA (harus diam manis dan menurut serta harus mau dibodohi) dan lagi janji-janji tentang keadilan, kebenaran, kemakmuran dan kebebasan adalah menjadi Omong kosong belaka, oleh karenanya Kontrol Sosial itu penting agar apa yang dilakukan oleh pemerintah tidak menyeleweng serta merugikan kepentingan rakyat banyak terutama rakyat lemah

Adapun langkah-langkah yang ditempuh untuk mewujudkan kembali Kontrol Sosial :

1. Membentuk Solidaritas rakyat guna menggalang kekuatan untuk mewujudkan kontrol sosial
2. BerEmphaty (merasakan rasa senasib terhadap penderitaan orang lain mis orang yang digusur rumahnya, orang yang digebuki oleh aparat andaikan bahwa anda yang merasakan (bagaimana rasanya ?)
3. Memupuk rasa Nasionalisme untuk menumbuhkan jiwa-jiwa peduli bangsa
4. Membangun kesadaran Komunal (orang banyak) dengan cara :
5. Membuat kelompok diskusi yang berfungsi sebagai wadah melihat kondisi dan kejadian-kejadian seputar Indonesia serta berfungsi sebagai wadah pendidikan Politik Rakyat. (kalau didunia musisi Underground kita kenal Tongkrongan2, Tongkrongan itu bisa dimanfaatkan sebagai ajang tukar informasi dan Diskusi tidak hanya masalah kaset, aliran musik namun juga yang berkenaan dengan bangsa dan negara atau masalah POLEKSOSBUD HANKAM berupa News paper, majalah, pamflet seperti yang sekarang ini lagi banyak muncul didunia musisi U dan itu sangat baik untuk dipertahankan VIVA !!. Serta obrolan-obrolan tentang bangsa tentunya
6. Menggunakan Musik disamping sebagai ajang Ekspresi seni namun juga sebagai alat atau media komunikasi namun juga sebagai penyampaian pesan yang mengajak pada pergerakan kesadaran.
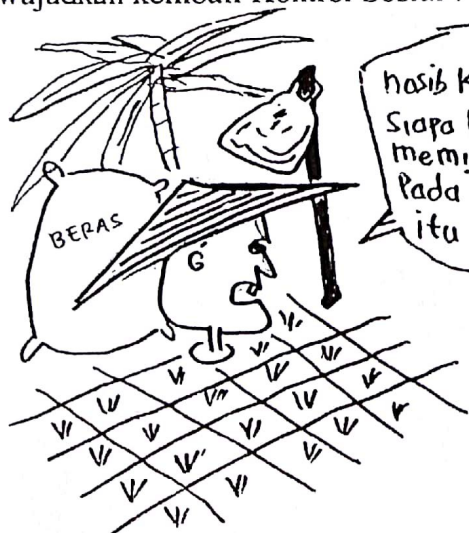
7. Bereaksi terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di Indonesia.
8. Bereaksi terhadap segala bentuk kebijakan yang dibuat pemerintah sesuai atau nggak dengan keinginan dan yang diharapkan oleh rakyat.
9. Melakukan Aksi sebagai reaksi terhadap bentuk ketimpangan-ketimpangan dengan menyebar pamflet, Stiker, Spanduk atau Demonstrasi Perlawanan atau Himbauan.
10. Sadar berorganisasi sebagai bentuk kesatuan tujuan pergerakan dengan bergabung dengan OTB (Organisasi Tanpa Bentuk) dimana tak ada tingkatan didalamnya seperti ketua, wakil, bendahara nggak ada.yang ada hanya pertukaran informasi dan diskusi./ bergabung dg organisasi yg sudah ada.
11. Membentuk Obrolan-Obrolan atau Ngrumpi mengenai masalah bangsa dan negara dan lingkungan sekitar, dimana saja baik itu disekolah, dikantor, dirumah dijalan, dsb.
12. Menghilangkan rasa takut pada politik atau menganggap politik itu kejam, kita sadari bahwa perjuangan perlawanan (politik) ada yang secara kejam dan ada yang secara damai kita pilih jalan damai menuju kebebasan bersuara dan berpendapat. (Kalau pemerintah tak mendengar dan memperhatikan kita buat apa dipertahankan) kita tuntut hak kita.

Selamat berjuang

Mewujudkan masyarakat yang mampu mengontrol Sosial berarti merebut kedaulatan rakyat yang selama ini dikebiri. Mewujudkan masyarakat yang mampu mengontrol Sosial berarti mewujudkan Demokrasi (Dari, Oleh dan Untuk Rakyat) mewujudkan masyarakat yang mampu mengontrol Sosial adalah awal kebenaran dan keadilan di tegakkan.

[Penulis adalah rakyat tertindas]

Dalam Hukum & Perpolitikan INDONESIA. Maling Ayam lebih Berat, Hukumannya Dari pada Seorang Koruptor!! ini menandakan penyakit ketidakadilan semakin Membudaya.
Kondisi ini bisa di balik dimana Koruptor lebih berat Hukumannya daripada Maling Ayam Apabila Rakyat bersatu!

turut di Edarkan bersama S'Gerilya *04/Juli '99

(mengkopy / memperbanyak & Menyebarluaskan berarti ~~Saling~~ Membantu menyebarkan INFORMASI)